

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menekankan TPT sebagai elemen penting yang menjadi fokus utama analisis makroekonomi yang krusial sebagai dasar pertimbangan kesehatan pasar tenaga kerja serta kinerja perekonomian suatu wilayah. Sebagai ukuran proporsi angkatan kerja yang belum terserap namun sedang mencari pekerjaan, TPT berfungsi sebagai cermin dari tingkat penyerapan tenaga kerja di suatu daerah (Badan Pusat Statistik., 2024). Tingginya TPT bukan hanya mencerminkan permasalahan ketenagakerjaan, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap perekonomian dan stabilitas sosial. Secara ekonomi, tingginya tingkat pengangguran mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, menghambat pertumbuhan konsumsi, dan mengurangi kontribusi potensial sumbangan sektor ketenagakerjaan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara sosial, pengangguran yang berkepanjangan dapat memicu peningkatan angka kemiskinan, memperlebar kesenjangan pendapatan, serta mendorong timbulnya permasalahan sosial seperti kriminalitas, ketegangan sosial, dan bahkan instabilitas politik. Dalam kerangka pembangunan daerah, TPT menjadi indikator yang harus diawasi secara ketat karena dipengaruhi oleh beragam faktor mulai dari demografi, kualitas sumber daya manusia, kondisi sektor ekonomi, hingga kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan. Provinsi Jawa Barat, sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia,

menghadapi tantangan besar dalam menekan angka pengangguran. Jumlah tenaga kerja yang bertambah setiap tahun menciptakan tekanan tambahan terhadap pasar kerja, sementara ketersediaan lapangan kerja, khususnya di sektor formal, sering kali tidak cukup untuk mengimbangi lonjakan tersebut. Kondisi ini menegaskan urgensi penelitian yang menganalisis determinan TPT di Jawa Barat, khususnya dengan mempertimbangkan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah, dan upah minimum, yang semuanya memiliki keterkaitan secara simultan memengaruhi dinamika pengangguran terbuka di wilayah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan satuan persentasi % dijadikan parameter untuk mengukur bagian dari Angkatan kerja potensial yang tergabung dalam angkatan kerja, baik yang sudah yang sudah terserap atau aktif di pasar kerja (Badan Pusat Statistik, 2024). Tingginya TPAK menandakan bahwa semakin banyak penduduk yang siap dan bersedia untuk bekerja, yang di satu sisi dapat mendorong produktivitas ekonomi, namun di sisi lain juga berpotensi meningkatkan jumlah pencari kerja jika adanya kesenjangan antara penawaran tenaga kerja. Hubungan antara TPAK dan TPT tidak bersifat linear; dalam kondisi pasar kerja yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal, kenaikan TPAK dapat menurunkan pengangguran. Sebaliknya, jika penyerapan tenaga kerja rendah, kenaikan TPAK justru dapat memperburuk tingkat pengangguran (Mankiw N. Gregory, 2021) Di Jawa Barat, TPAK pada Februari 2023 mencapai 66,75 persen, menunjukkan tren peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya (BPS, 2024d) Namun, peningkatan ini tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang merata di seluruh

wilayah. Beberapa kabupaten/kota masih menghadapi keterbatasan lapangan kerja, Khususnya pada lapangan kerja formal dan industri berbasis tenaga kerja. Hal ini memperlihatkan bahwa TPAK memiliki signifikansi yang tinggi sebagai variabel penjelas dalam analisis TPT di Jawa Barat, sehingga pemahamannya menjadi penting dalam merumuskan strategi penurunan pengangguran terbuka.

Pertumbuhan penduduk dengan satuan persentasi % juga memainkan peran penting dalam membentuk dinamika TPT karena secara langsung memengaruhi ukuran angkatan kerja. Jawa Barat mencatat jumlah penduduk sebesar 49,86 juta jiwa pada tahun 2023, menjadikannya provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024). Pertumbuhan penduduk yang pesat berpotensi menjadi sumber kekuatan ekonomi jika diimbangi dengan modal manusia yang berkualitas, suatu kondisi yang dikenal sebagai bonus demografi (Todaro, Micheal p. and Smith, 2020). Akan tetapi, jika daya serap pasar kerja tidak optimal, pertumbuhan ini justru meningkatkan jumlah pencari kerja dan memperburuk pengangguran.

Fenomena urbanisasi yang cepat di Jawa Barat menambah kompleksitas persoalan, terutama di kota-kota besar seperti Bandung, Bekasi, dan Bogor, di mana persaingan kerja semakin ketat. Bahkan sedikit kenaikan persentase TPT dapat berarti bertambahnya ratusan ribu penganggur, mengingat besarnya basis populasi. Oleh karena itu, analisis terhadap pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap TPT di Jawa Barat menjadi krusial, baik dari sisi perencanaan ekonomi maupun penentuan kebijakan ketenagakerjaan.

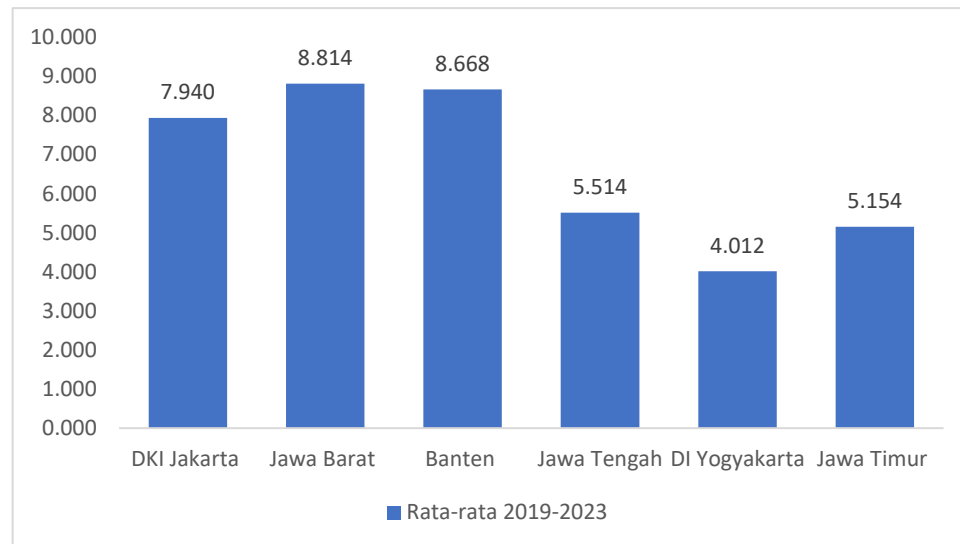
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan ukuran signifikan untuk menilai kualitas sumber daya manusia berdasarkan lama Pendidikan (BPS, 2024b). Tingkat Pendidikan yang memadai secara teoritis meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperluas akses terhadap pekerjaan yang lebih baik, dan menekan angka pengangguran. Namun, peningkatan tingkat pendidikan tidak selalu otomatis menurunkan TPT, terutama jika struktur lapangan kerja tidak sesuai dengan kualifikasi lulusan, yang dapat memicu fenomena pengangguran terdidik (Sukirno, 2016). Pada tahun 2023, RLS di Jawa Barat tercatat sebesar 9,2 tahun, setara dengan tingkat pendidikan SMP, yang menunjukkan masih rendahnya capaian pendidikan dibandingkan target wajib belajar 12 tahun. Rendahnya RLS ini berimplikasi pada terbatasnya keterampilan tenaga kerja dan rendahnya daya saing dalam pasar kerja formal yang menuntut keterampilan tinggi. Dalam konteks ini, peningkatan RLS diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penurunan TPT, tetapi pengaruhnya perlu dianalisis secara empiris, terutama di wilayah dengan disparitas akses pendidikan yang besar seperti Jawa Barat.

Upah minimum, sebagai kebijakan yang mengatur batas terendah gaji yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja, juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi TPT. Di Jawa Barat, upah minimum bervariasi antar kabupaten/kota, disesuaikan dengan perbedaan biaya hidup dan kondisi ekonomi (BPS, 2024f). Teori ekonomi tenaga kerja menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun jika kenaikan tersebut melampaui produktivitas tenaga kerja, hal ini dapat mendorong perusahaan mengurangi perekrutan atau bahkan melakukan

pemutusan hubungan kerja(J. Borjas, 2020). Pada 2023, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat diatur senilai Rp1.986.670, sementara Upah Minimum Kota (UMK) tertinggi berada di Kota Bekasi sebesar Rp5.158.248. Perbedaan besar ini mencerminkan adanya disparitas daya serap tenaga kerja antarwilayah. Dampak kebijakan upah minimum terhadap TPT perlu dipahami secara mendalam untuk memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan efek samping berupa meningkatnya pengangguran terbuka.

Berdasarkan data historis, TPT di Jawa Barat menunjukkan pola fluktuasi dengan peningkatan substansial selama periode lima tahun terakhir. Pada Februari 2019, TPT berada di level 7,73 persen dan sedikit menurun menjadi 7,69% pada Februari 2020 (BPS, 2024e) Namun, pandemi COVID-19 pada 2020–2021 menyebabkan lonjakan angka pengangguran hingga mencapai 8,92% pada 2021. Seiring pemulihan ekonomi, TPT mulai menurun menjadi 7,96% pada Februari 2022 dan kembali turun ke 7,89% pada Februari 2023. Tren penurunan ini berlanjut pada Februari 2024 dengan angka 6,91%, dan diperkirakan kembali turun menjadi sekitar 6,74% pada 2025 (BPS, 2025). Meski demikian, angka ini relatif lebih tinggi apabila dikomparasi dengan provinsi-provinsi se-pulau Jawa contohnya Jawa Tengah (5,51%) dan DI Yogyakarta (4,01%). Fakta ini mengindikasikan bahwa permasalahan pengangguran di Jawa Barat bersifat struktural dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran, bukan hanya bertumpu pada perbaikan siklus ekonomi pasca-pandemi.

**Gambar 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Satuan % menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023**

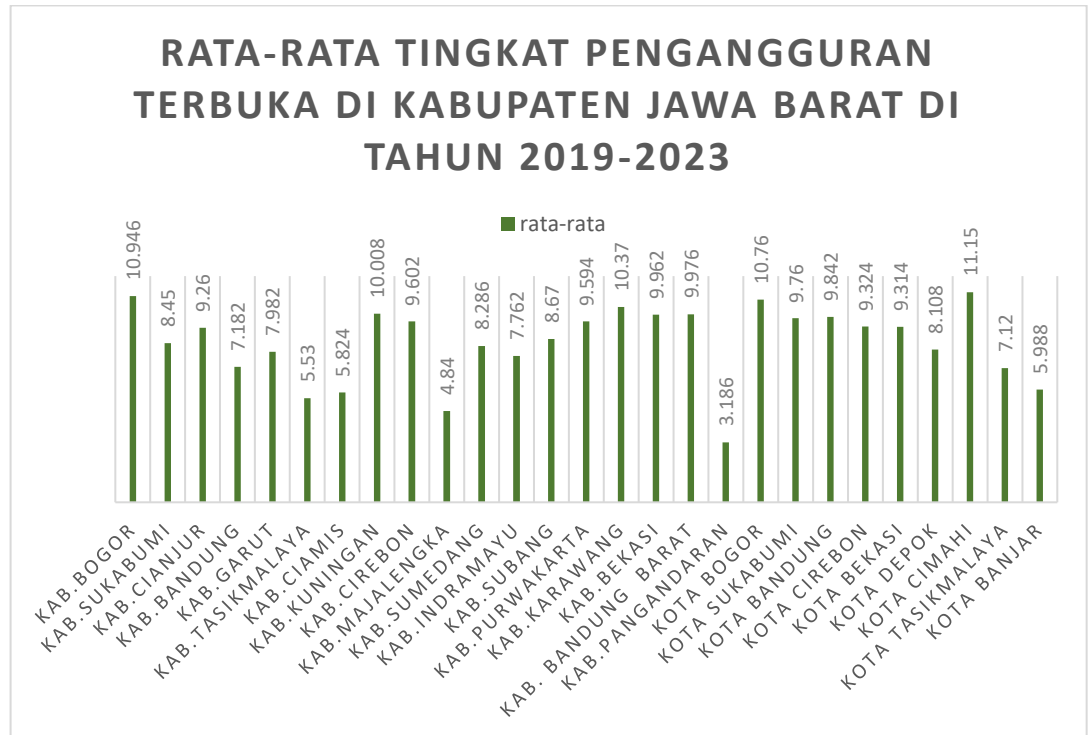


Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah 2025

Berdasarkan komparasi regional se-Pulau Jawa, kondisi Jawa Barat menempati posisi kedua tertinggi dalam rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode 2019–2023, yaitu sebesar 8,81%, hanya sedikit lebih tinggi dari Provinsi Banten yang mencatatkan rata-rata sebesar 8,67%. Sementara itu, DKI Jakarta mencatat rata-rata TPT sebesar 7,94%, Jawa Tengah 5,51%, DI Yogyakarta 4,01%, dan Jawa Timur 5,15% (Badan Pusat Statistik., 2024). Perbedaan ini menggambarkan adanya faktor struktural, demografis, dan kebijakan ekonomi yang berbeda di masing-masing provinsi, yang memengaruhi kinerja pasar tenaga kerja mereka. Tingginya angka TPT di Jawa Barat menjadi ironi tersendiri mengingat provinsi ini memiliki basis industri manufaktur terbesar di Indonesia, kontribusi signifikan terhadap Produk *Domestik Regional Bruto* (PDRB) nasional, dan menjadi salah satu pusat utama investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*).

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara potensi ekonomi yang besar dengan realisasi penyerapan tenaga kerja yang masih relatif rendah.

**Gambar 1. 2 Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka satuan % di Kabupaten Jawa Barat di Tahun 2019-2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah 2025

Berdasarkan grafik rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahunan di Kabupaten/Kota Jawa Barat selama periode 2019 hingga 2023, terlihat adanya disparitas regional yang signifikan, dengan rata-rata TPT tertinggi tercatat di Kota Cimahi (sekitar 11.15%) dan Kabupaten Bogor (sekitar 10.94%). Pola ini menunjukkan bahwa TPT cenderung tinggi di kawasan metropolitan dan industri padat, seperti Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, yang semuanya memiliki rata-rata di atas 9.5%, mengindikasikan tekanan tinggi pada pasar tenaga kerja akibat tingginya migrasi pencari kerja atau ketidaksesuaian keterampilan. Sebaliknya, wilayah

seperti Kabupaten Pangandaran mencatat rata-rata TPT terendah (sekitar 3.5%), yang mencerminkan struktur ekonomi yang berbeda, mungkin didominasi oleh sektor yang lebih padat karya. Oleh karena itu, variasi TPT antar wilayah ini memerlukan analisis ekonometrika lebih lanjut untuk menguji apakah faktor seperti Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan menjadi penentu utama dari disparitas pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

Rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja di tengah potensi industri yang tinggi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti mismatch keterampilan, persaingan dengan tenaga kerja dari luar daerah, dan kebijakan upah yang tidak selaras dengan produktivitas. Dalam konteks inilah, penelitian yang menelaah secara simultan faktor-faktor seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah, dan upah minimum menjadi penting. Analisis yang menyeluruh dan berbasis data empiris diharapkan dapat mengidentifikasi kombinasi variabel yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap TPT, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, temuan penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang berarti dalam merancang strategi penanggulangan pengangguran di Jawa Barat yang efektif dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan gambaran awal mengenai hubungan antara variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian ini dengan TPT. Salah satu studi yang dilakukan oleh (Habibi et al., 2024) menemukan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah berkontribusi pada peningkatan



keterampilan tenaga kerja, yang pada gilirannya memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang yang efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran, sejalan dengan teori modal manusia yang dikemukakan oleh Becker (1993) dalam penelitian (Buabeng & Amo-Darko, 2024) yang menyatakan bahwa pendidikan meningkatkan produktivitas individu. Selain itu, pendidikan formal yang lebih lama juga membuka akses terhadap pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus dan berpenghasilan lebih tinggi, sehingga menurunkan risiko pengangguran struktural. Namun demikian, studi tersebut hanya berfokus pada variabel pendidikan tanpa mempertimbangkan pengaruh variabel lain seperti TPAK, pertumbuhan penduduk, dan kebijakan upah minimum, yang juga berperan penting dalam menentukan dinamika pasar tenaga kerja. Keterbatasan cakupan variabel ini membuat hasil penelitian tersebut sulit digeneralisasikan ke konteks provinsi lain, terutama Jawa Barat yang memiliki struktur ekonomi dan kepadatan penduduk yang berbeda.

Oleh karena itu, penelitian ini akan memperluas pendekatan dengan memasukkan variabel-variabel tersebut agar dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh dan relevan terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkuat literatur yang ada, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang determinan TPT di tingkat provinsi.

Penelitian oleh (Novitasari & Kurniawan, 2023) menganalisis pengaruh kebijakan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Indonesia

menggunakan data panel antarprovinsi. Hasilnya menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penurunan TPT, meskipun efeknya bervariasi antarwilayah tergantung pada struktur industri dan tingkat produktivitas tenaga kerja setempat. Temuan ini memberikan indikasi bahwa kebijakan upah yang tepat dapat menjadi instrumen untuk menekan pengangguran, khususnya di wilayah dengan sektor industri yang padat karya dan produktivitas yang memadai.

Sebaliknya, studi oleh (Silvia Luthfiyah Ghinastri & Syafitri, 2024) justru menemukan bahwa kenaikan upah minimum berkorelasi positif dengan TPT di daerah dengan produktivitas rendah, karena perusahaan cenderung mengurangi tenaga kerja untuk menekan biaya produksi. Hal ini menggarisbawahi sifat kontekstual hubungan antara upah minimum dan pengangguran, yang dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi lokal. Selain itu, studi (Safrina & Ratna, 2024) meneliti peran TPAK terhadap TPT dan menemukan bahwa TPAK yang tinggi dapat menurunkan TPT jika lapangan kerja tersedia dalam jumlah memadai, namun dapat meningkatkan TPT ketika pertumbuhan ekonomi melambat atau sektor industri stagnan. Perbedaan hasil antarpelitian ini mengindikasikan adanya faktor-faktor interaksi dan moderasi yang belum sepenuhnya dijelaskan. Dalam penelitian ini, variabel TPAK, pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah, dan upah minimum akan diintegrasikan dalam satu model ekonometrika untuk menguji pengaruh langsung maupun interaksinya terhadap TPT. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana

variabel-variabel tersebut bekerja bersama dalam memengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Barat.

Berdasarkan penjelasan ini, terdapat beberapa celah penelitian (research gap) Pertama, hasil penelitian terkait pengaruh upah minimum dan TPAK terhadap TPT menunjukkan ketidakselarasan, yang menandakan adanya variabel moderator atau perbedaan kontekstual yang belum menjelaskan sepenuhnya. Kedua, mayoritas studi menggunakan data sebelum pandemi COVID-19, sehingga tidak menangkap perubahan struktural pasar kerja yang terjadi pasca-pandemi, seperti digitalisasi proses rekrutmen, pergeseran sektor dominan, dan penyesuaian pola kerja. Ketiga, belum banyak penelitian yang membedakan pengaruh variabel-variabel tersebut pada level kabupaten/kota dalam satu provinsi, padahal heterogenitas antarwilayah di dalam provinsi dapat memengaruhi hasil analisis. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan memanfaatkan data terbaru periode 2019–2023, yang mencakup masa sebelum, saat, dan setelah pandemi, serta menggunakan pendekatan ekonometrika panel data untuk memungkinkan analisis simultan yang lebih akurat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas pemahaman tentang determinan TPT, sekaligus kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis bukti di tingkat daerah.

Berdasarkan permasalahan dan celah penelitian yang telah diidentifikasi, tujuan utama penelitian ini untuk menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat

periode 2009–2023. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui arah hubungan dan besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap TPT; (2) menganalisis pengaruh simultan keempat variabel tersebut terhadap TPT; dan (3) mengidentifikasi variabel yang paling dominan memengaruhi TPT.

Urgensi akademis penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya literatur empiris terkait determinan pengangguran di tingkat provinsi dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Sementara itu, urgensi praktisnya adalah menyediakan bukti ilmiah yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran. Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang mempertimbangkan kondisi riil pasar kerja di Jawa Barat, termasuk potensi sektor unggulan dan hambatan struktural yang ada. Dengan memanfaatkan data resmi dari BPS dan analisis yang berbasis metode ilmiah yang valid, penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang kredibel dalam proses pengambilan keputusan. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya menurunkan angka pengangguran terbuka secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Barat.

Melihat kompleksitas interaksi antar variabel-variabel tersebut, sehingga relevan untuk menganalisis secara mendalam **“Pengaruh TPAK, Pertumbuhan Penduduk, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Barat”**.

Pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan kausalitas antar variabel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Jawa Barat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Identifikasi masalah yang jelas sangat penting dalam penelitian ini untuk menentukan arah analisis, membatasi cakupan kajian, dan memastikan bahwa penelitian kuantitatif dapat menguji hipotesis secara tepat. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat?
4. Apakah pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh Rata-rata Lama sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat.

#### **1.4. Ruang Lingkup**

Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Cakupan penelitian dibatasi pada data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber resmi lainnya, dengan periode waktu tertentu yang merepresentasikan kondisi terkini serta relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antarvariabel secara empiris.

Ruang lingkup penelitian ini tidak mencakup faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti, seperti inflasi, investasi, migrasi, atau kebijakan fiskal dan moneter secara detail. Selain itu, penelitian ini tidak membahas aspek kualitatif seperti persepsi masyarakat terhadap pengangguran atau faktor psikologis yang memengaruhi keputusan bekerja. Dengan pembatasan ini, penelitian dapat lebih terfokus dan terarah pada tujuan utama, yaitu mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel yang telah ditentukan terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah yang menjadi objek studi

### 1.5. Manfaat Penelitian

Berikut ini manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini:

1. **Bagi pemerintah**, penelitian ini dapat dijadikan gambaran nyata dan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait peningkatan partisipasi angkatan kerja, pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas pendidikan, serta penetapan upah minimum yang efektif untuk menekan tingkat pengangguran terbuka.
2. **Bagi masyarakat umum**, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan tambahan dan bahan literasi ekonomi yang relevan, sehingga masyarakat lebih memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka dan mampu mengambil langkah yang lebih tepat dalam menghadapi dinamika pasar kerja.
3. **Bagi universitas**, penelitian ini dapat memperkaya koleksi referensi akademis dan katalog pustaka di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa timur, serta menjadi acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas isu serupa, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan dan ketenagakerjaan di tingkat daerah.
4. **Bagi peneliti**, penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam kemampuan analisis data, memperluas wawasan dalam mengkaji permasalahan ketenagakerjaan secara ilmiah, serta membiasakan diri dalam penyusunan karya ilmiah yang sistematis, objektif, dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.